

Published By : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar E ISSN : 2828 - 4054



SAWERIGADING
LAW JOURNAL

Vol.4 No.2, September 2025, Hal 61-75

Bretton Woods di Era Globalisasi: Kritik dan Reformasi

Fadilla Jamila¹, Wahyu Hidayat², Melantik Rompegading³

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

²Pengadilan Negeri Kolaka

³Fakultas Hukum Universitas Sawerigading

Corresponding Author : fadillajamila@unhas.ac.id

Abstrak

Kedua Lembaga Bretton Woods yaitu International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, telah menjadi pilar tata kelola keuangan global sejak tahun 1944. Namun, memasuki abad ke-21, relevansi kedua lembaga ini menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan kritik yang dihadapi oleh IMF dan Bank Dunia, serta mengevaluasi efektivitas upaya reformasi yang telah dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji literatur dan aturan relevan terkait operasional lembaga keuangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya enam permasalahan utama pada lembaga ini yaitu ketidakadilan sistem kuota, dominasi negara maju (terutama Amerika Serikat), minimnya representasi negara berkembang, kontroversi persyaratan pinjaman yang bernuansa neoliberalisme, ancaman dari lembaga keuangan regional baru (seperti NDB dan AIIB), serta masalah stabilitas sumber daya pinjaman. Meskipun IMF dan Bank Dunia telah melakukan upaya reformasi, seperti penyesuaian persyaratan pinjaman dan peningkatan kuota umum, perubahan tersebut dinilai belum menyentuh akar permasalahan. Dominasi suara Amerika Serikat tetap menjadi hambatan utama bagi evolusi lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi fundamental yang mencakup peninjauan ulang sistem kuota, peningkatan ruang bagi negara berkembang agar Lembaga Bretton Woods tetap relevan dalam menjaga stabilitas ekonomi global di masa depan.

Kata Kunci: Bretton Woods; IMF; Reformasi; Bank Dunia

Abstract

The two Bretton Woods institutions, the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, have been pillars of global financial governance since 1944. However, entering the 21st century, the relevance of these two institutions faces significant challenges due to globalization. This study aims to analyze the various challenges and criticisms facing the IMF and the World Bank, as well as to

disseminate the effectiveness of their reform efforts. Using normative legal research methods through a contextual approach, this paper examines relevant literature and regulations related to the operations of international financial institutions. The results indicate six major problems within these institutions: the unfairness of the quota system, the dominance of developed countries (especially the United States), the lack of representation of developing countries, the controversy surrounding neoliberal loan conditionality, the threat from new regional financial institutions (such as the NDB and AIIB), and the issue of loan resource stability. Although the IMF and World Bank have undertaken reform efforts, such as adjusting loan conditions and increasing general quotas, these changes are deemed to have failed to address the root causes. The dominance of the United States remains a major challenge to the institutions' evolution. This study concludes that fundamental reforms are needed, including a review of the quota system and increased space for developing countries, to ensure the Bretton Woods Institutions remain relevant in maintaining global economic stability in the future.

Keywords: Bretton Woods Institutions; IMF; Reform; World Bank

PENDAHULUAN

Konferensi Bretton Woods diadakan pada bulan Juli 1944 menghadirkan perwakilan dari 44 negara(Lowenfeld, 2008). dengan tujuan untuk membahas masalah tata kelola keuangan dan moneter pasca perang.(Mazower, 2012). Konferensi ini membentuk dua lembaga keuangan yang sekarang dikenal sebagai Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia atau Bank Dunia. IMF dirancang untuk membantu negara-negara mencapai dan mempertahankan stabilitas keuangan.(Lowenfeld, 2008) IMF memberikan bantuan jangka pendek dan menengah kepada negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. IMF juga memberikan nasihat kebijakan makroekonomi, dan pelatihan bantuan teknis kepada negara-negara anggotanya untuk meningkatkan manajemen ekonomi mereka (Mazower, 2012). Sementara Bank Dunia awalnya dirancang untuk membantu negara-negara membangun kembali setelah perang. Saat ini, Bank Dunia berperan untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara untuk memerangi kemiskinan dan bantuan jangka panjang kepada negara-negara untuk proyek rekonstruksi atau pembangunan.(Lowenfeld, 2008) Saat ini, Bank Dunia fokus pada proyek-proyek yang berkaitan dengan peningkatan modal manusia seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pengendalian populasi.

Telah terjadi beberapa perubahan sepanjang perjalanan lembaga-lembaga ini. Pergeseran fokus, perubahan sistem, dan beberapa reformasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dunia saat ini. Pada tahun 1980-an, IMF dan Bank Dunia dikenal mempromosikan neoliberalisme melalui persyaratan pinjaman mereka (Babb & Kentikelenis, 2018). Persyaratan lembaga-lembaga ini dikenal sebagai Konsensus Washington dan banyak dikritik.(Rodrik, 2006) Di era globalisasi, tuntutan negara dan dunia ekonomi semakin tinggi dan lembaga-lembaga Bretton Woods perlu menyesuaikan diri dan melakukan reformasi agar dapat mengikuti pola-pola ini dan tetap relevan untuk menjalankan fungsinya. Masalah-masalah pun muncul. IMF dan Bank Dunia bukan lagi satu-satunya lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada negara-negara. Terdapat kritik dan hambatan yang dapat mengancam relevansi lembaga-lembaga ini.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apa saja tantangan dan kritik yang dihadapi lembaga-lembaga ini dan apa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga keuangan Bretton Woods dan untuk melihat apakah reformasi saat ini sudah cukup atau belum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk membedah problematika yuridis dan struktural pada Lembaga Bretton Woods. Mekanisme analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa perjanjian internasional terkait pembentukan IMF dan Bank Dunia, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur akademik, jurnal hukum, dan laporan resmi lembaga internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERMASALAHAN INSTITUSI BRETON WOODS

1. Kontroversi Sistem Kuota IMF

IMF memiliki sistem kuota negara anggota yang mencerminkan kontribusi negara anggota terhadap sumber daya Dana IMF, hak penarikan dana, dan hak suara mereka. Sistem ini dikritik karena dirancang untuk era lama karena memberikan hak istimewa kepada negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat.(Faundez & Tan, 2009) Para promotor awal IMF sepakat untuk memberikan kuota tertinggi kepada Amerika Serikat, diikuti oleh Inggris, Rusia, dan China secara berurutan.(Ikechukwu, 2011) Sekarang, urutannya telah berubah, tetapi AS masih memegang kuota terbesar serta hak suara terbanyak. Penentuan sistem kuota menggunakan rumus yang ditentukan oleh empat elemen yang terdiri dari rata-rata PDB sebesar 50 persen, keterbukaan sebesar 30 persen, variabilitas ekonomi sebesar 15 persen, dan cadangan devisa sebesar 5 persen(IMF, 2025). Sistem ini ditinjau setiap lima tahun.[5]

Karena sistem kuota IMF sangat dipengaruhi oleh jumlah iuran anggotanya, negara terkaya akan memiliki kuota terbesar dan negara miskin akan mendapatkan kuota terkecil. Hal ini kemudian menyebabkan masalah kekuatan suara yang dipengaruhi oleh proporsi kuota. Negara berkembang yang memiliki PDB lebih rendah daripada negara maju akan memiliki kekuatan suara yang kecil. Akan terjadi ketidaksetaraan dan sistem ini akan menghambat perkembangan lembaga ini karena pergerakannya dibatasi oleh kekuatan negara atau kelompok negara yang memegang kuota terbesar.

2. Dominasi negara-negara industri, khususnya Amerika Serikat

IMF dan Bank Dunia telah dikritik karena tidak memiliki struktur atau prosedur untuk mengambil keputusan yang mencerminkan kepentingan mayoritas negara. Perilaku Lembaga Bretton Woods ditentukan oleh pengaruh negara-negara anggotanya yang kuat(Momani, 2004). Negara-negara Barat dulunya mendominasi ekonomi dunia, tetapi sekarang beberapa negara pasar berkembang telah mencoba untuk bersaing. IMF dan Bank Dunia dikendalikan dan didominasi oleh negara-negara maju

dan industri, khususnya Amerika Serikat. Baik IMF maupun Bank Dunia berlokasi di Washington DC. Selain itu, AS memiliki kekuatan terbesar dibandingkan dengan anggota lainnya dengan memiliki hak suara terbesar yang pada tahun 2015 memegang 16,7% saham suara di IMF dan 16,1% di Bank Dunia (Babb & Kentikelenis, 2018) dan saat ini memiliki hak veto (Woods, 2002). Hak veto AS dapat digunakan untuk memengaruhi keputusan lembaga-lembaga ini dan menghalangi mereka untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan AS. Selain itu, pemimpin IMF selalu orang Eropa sementara pemimpin Bank Dunia selalu orang Amerika. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi lembaga-lembaga tersebut. Hingga baru-baru ini, AS memiliki begitu banyak pengaruh terhadap Lembaga Bretton Woods dan independensinya menjadi dipertanyakan.

3. Kurangnya Representasi bagi Negara Berkembang

Saat ini, peminjam utama IMF dan Bank Dunia adalah negara-negara berkembang. Lembaga Bretton Woods ini dikritik karena negara-negara berkembang kurang terwakili di dalam lembaga-lembaga tersebut.(Woods, 2002) Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mereka memiliki porsi kecil kekuatan suara. Dengan demikian, mereka memiliki suara dan kemampuan yang lebih sedikit dalam pengambilan keputusan. Ini menjadi masalah karena mereka adalah pihak yang kemungkinan besar akan terpengaruh oleh keputusan tersebut. Idealnya, IMF dan Bank Dunia terwakili secara universal.(Parkinson, 2014) Diperlukan reformasi suara untuk memastikan negara-negara berkembang dapat memiliki keterlibatan dan peran yang lebih besar di kedua lembaga tersebut.

IMF dan Bank Dunia juga dikritik karena kecenderungannya mempekerjakan lebih banyak lulusan dan ahli dari Amerika Utara dan negara-negara Barat. Mereka juga dikatakan dipengaruhi oleh LSM yang sebagian besar berbasis di negara-negara industri(Woods, 2002). Mereka perlu melibatkan negara-negara berkembang dan memberi mereka kesempatan untuk belajar, berpartisipasi, dan mengambil bagian. Lembaga Bretton Woods

adalah organisasi dunia dan perlu mengurangi ketidakberpihakan dalam sistem mereka.

4. Kontroversi Persyaratan Pinjaman

Untuk menerima pinjaman, lembaga-lembaga ini memberlakukan persyaratan pinjaman(Qureshi & Ziegler, 2007). Persyaratan tersebut merupakan daftar kebijakan yang diharapkan lembaga-lembaga tersebut dari negara peminjam agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan anggaran dasar lembaga-lembaga tersebut(Lowenfeld, 2008). Hal ini berfungsi sebagai pengamanan yang memadai(Qureshi & Ziegler, 2007). Dapat dipahami jika lembaga-lembaga ini memberlakukan ketentuan yang harus dipatuhi oleh negara peminjam sebagai pengembalian pinjaman yang telah diberikan serta untuk membantu mereka menstabilkan keuangan dan mengurangi kemiskinan.

Di era globalisasi, Konsensus Washington dianggap tidak lagi relevan untuk ekonomi dunia. Lembaga-lembaga tersebut tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan kepentingan khusus beberapa anggota kepada negara peminjam. Isi persyaratan tidak boleh melebihi kedaulatan negara. Lembaga-lembaga ini perlu mulai “menempatkan negara berkembang sebagai peminjam di kursi pengemudi”(Woods, 2002) dengan menyesuaikan persyaratannya. Sejumlah krisis keuangan, di Meksiko, Asia Tenggara, Rusia, dan Argentina, juga menunjukkan bahwa Konsensus Washington tidak sepenuhnya berhasil (Stiglitz, 2008). Lembaga-lembaga tersebut tampaknya ikut campur dalam keputusan dan kebijakan internal peminjam. Isi persyaratan pinjaman perlu disesuaikan agar dapat membantu negara peminjam itu sendiri. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa persyaratan pinjaman yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga ini merupakan cara untuk mempromosikan neoliberalisme. Hal ini mendorong privatisasi dan pasar ekonomi liberal. Persyaratan pinjaman dikritik oleh negara-negara terpinggirkan karena persyaratan tersebut harus diterapkan tanpa mempertimbangkan situasi internal dan budaya negara tersebut.

Perlu dipertimbangkan bahwa setiap negara menghadapi masalah yang berbeda dan memiliki kebijakan serta budaya internal yang berbeda. Oleh karena itu, tidak semua kebijakan dalam persyaratan pinjaman dapat diterapkan. Hal itu mungkin tidak sesuai dengan negara peminjam dan bertentangan dengan adat dan budayanya.

5. Munculnya Lembaga Keuangan Regional

Pasar negara-negara berkembang telah menantang Lembaga Bretton Woods dan lembaga keuangan regional mulai berkembang. Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, yang dikenal sebagai negara-negara BRICS, telah mulai mengembangkan New Development Bank atau dikenal sebagai NDB (Guven, 2017). Bank ini didirikan dengan fokus yang sama dengan Bank Dunia, yaitu infrastruktur (Griffith-Jones, 2015). Selain itu, negara-negara Asia yang dipimpin oleh Cina juga telah mendirikan Asian Infrastructure Investment Bank(AIIB). Bank ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan untuk infrastruktur di Asia dan negara-negara tetangga (Weiss, 2017). Berbeda dengan lembaga Bretton Woods yang berbasis di Amerika Serikat, kedua lembaga keuangan ini berbasis di Cina (Babb & Kentikelenis, 2018). Lembaga-lembaga keuangan tersebut merupakan bukti perkembangan negara-negara berkembang dan kekuatan suara mereka di dunia ekonomi. Lembaga-lembaga Keuangan Regional ini bertujuan untuk melengkapi lembaga Bretton Woods yang ada dan bukan penggantinya. Namun, mereka dapat menjadi ancaman bagi lembaga-lembaga ini, khususnya Bank Dunia (World Bank, 2015), jika mereka gagal melakukan reformasi dan memenuhi tuntutan ekonomi dunia, terutama negara-negara berkembang. Lembaga Bretton Woods perlu memperkuatnya untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan regional ini guna menjaga perdamaian ekonomi dunia. Jika lembaga-lembaga keuangan lain dapat melakukan fungsi yang sama dengan Lembaga Bretton Woods dengan cara yang lebih efektif sehingga dapat menarik negara-negara berkembang, IMF dan Bank Dunia dapat

tertinggal. Akibatnya, IMF dan Bank Dunia perlu terus berkembang dan mereformasi sistem mereka.

6. Isu IMF tentang Sumber Daya Pinjaman Aman

Pada abad ke-21, IMF didesak untuk melakukan reformasi guna memenuhi peran dan fungsinya. Krisis keuangan global pada tahun 2008 mengharuskan IMF untuk memperluas sumber daya pinjaman amannya (Wade & Vestergaard, 2015). Kuota IMF perlu ditingkatkan hingga dua kali lipat dari kuota sebelumnya untuk memastikan bahwa IMF memiliki sumber daya yang memadai dan untuk memperkuat jaring pengaman multilateral. Perjanjian IMF 2010 atau dikenal sebagai Tinjauan ke-14 dirancang untuk meningkatkan dan mengalokasikan kuota baru, khususnya kepada negara-negara berkembang untuk meningkatkan hak suara mereka dan untuk menyeimbangkan kekuatan antara negara maju dan negara berkembang (Truman, 2015). Isu peningkatan sumber daya keuangan IMF dan reformasi tata kelola IMF kemungkinan saling terkait. Oleh karena itu, untuk memperluas sumber daya keuangan IMF, kuota anggota perlu ditingkatkan. Namun, konsep yang diusulkan dalam Perjanjian 2010 diblokir oleh Amerika Serikat menggunakan hak vetonya. AS bersikeras menghubungkan kedua komponen tersebut dan tidak ingin kehilangan hak vetonya jika IMF meningkatkan kuotanya karena kuota Amerika Serikat dapat turun di bawah 85 persen yang merupakan ambang batas untuk meloloskan resolusi (Wade & Vestergaard, 2015). Oleh karena itu, Amerika Serikat memblokir implementasi tinjauan ke-14 selama hampir lima tahun. Hal ini membuat IMF harus bergantung pada kemauan baik negara-negara maju yang tidak menghadapi krisis untuk memberikan pinjaman jangka pendek.

Hal ini menekankan perlunya IMF melakukan reformasi mendasar. Situasi ini hanyalah contoh lain betapa terbatasnya pergerakan IMF karena dominasi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Dinamika ekonomi dunia sulit diprediksi. IMF sebagai pemberi pinjaman sumber daya terakhir untuk krisis ekonomi harus memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan

masalah ini. Jika tidak, IMF tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

UPAYA DAN REFORMASI LEMBAGA BRETON WOODS

Terlepas dari kritik yang ada, IMF tetap menjadi pemberi pinjaman terbesar di dunia dalam jangka waktu terakhir. Hal ini telah terbukti dalam peran dan partisipasi IMF selama krisis Zona Euro (Guven, 2017). Meskipun demikian, sebagian besar dana IMF ditujukan untuk negara-negara berkembang. Bank Dunia masih merupakan organisasi terbesar yang memberikan bantuan pembangunan langsung(Parkinson, 2014). Untuk mengatasi tantangan globalisasi di abad ke-21, lembaga-lembaga Bretton Woods ini telah berupaya untuk berevolusi dan melakukan beberapa reformasi. Yang perlu dibahas adalah apakah reformasi yang ada sudah cukup untuk menjawab tantangan globalisasi atau apakah reformasi mendasar masih diperlukan.

1. Persyaratan Reformasi

Kedua lembaga ini telah berupaya untuk meninjau kembali kritik tersebut. IMF telah berupaya untuk merevisi persyaratannya dan menerbitkan Pedoman tentang Persyaratannya pada tahun 2002(IMF, 2018) dan Bank Dunia telah merekomendasikan lima prinsip praktik baik dalam observasi persyaratannya pada tahun 2005(World Bank, 2007). Lembaga-lembaga ini telah berupaya mendorong lebih banyak kepatuhan dalam persyaratan pinjamannya(World Bank, 2006). Hal ini memberikan tanggung jawab dan kesalahan yang lebih besar kepada negara-negara peminjam untuk menerapkan kebijakan ekonomi dan keuangan(Eichengreen & Woods, 2015). Ini adalah langkah dan reformasi yang baik yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga ini untuk mengurangi masalah persyaratan pinjaman sebelumnya. Namun, implementasinya masih dipertanyakan. Laporan Akhir Persyaratan Pinjaman Bank Dunia melaporkan bahwa beberapa perwakilan negara telah mengakui peningkatan yang dibawa oleh konsep ini. Tetapi kritik masih tetap ada. Situasi di Mali, Malawi,

Nikaragua, Zambia, Bangladesh, dan Mozambik masih menunjukkan unsur privatisasi dan liberalisasi (SEED Europe, 2008). Masalah-masalah lama belum sepenuhnya teratas. Oleh karena itu, baik Bank Dunia maupun IMF masih perlu meninjau kemajuan saat ini dan memaksimalkan reformasi persyaratan pinjaman mereka.

Pada tahun 2009, IMF juga telah menyesuaikan persyaratan pinjamannya dengan menghapus kriteria kinerja struktural yang membutuhkannya secara formal (Guven, 2017). Beberapa revisi yang membawa ketentuan yang lebih lunak juga dilakukan untuk memberikan lebih banyak kesalahan pada berbagai kebijakan dan situasi di negara peminjam, khususnya negara berkembang. Namun, pertanyaan tentang implementasi masih ada. Persyaratan IMF dan khususnya Bank Dunia masih menimbulkan kontroversi apakah kebijakan tersebut benar-benar telah diubah untuk mengakomodasi kebutuhan negara peminjam, liberalisasi telah dihapus dan kepemilikan benar-benar diberikan. Persyaratan tersebut perlu dirancang untuk membantu negara pemberi pinjaman, meningkatkan perekonomian mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Oleh karena itu, masih perlu ditinjau dan disesuaikan untuk memenuhi tujuan ideal.

2. Reformasi Kuota dan Tata Kelola

Usulan reformasi kuota dan tata kelola dalam Tinjauan ke-14 IMF harus mengalami penundaan selama 5 tahun sebelum berlaku (IMF, 2016). Pada awal tahun 2016, akhirnya memperoleh 94 persen suara untuk menerima amandemen reformasi Dewan Eksekutif (IMF, 2017). Sementara pada April 2017, mencapai 99,757 persen persetujuan kuota untuk meloloskan Tinjauan ke-14 guna meningkatkan kuota anggota (IMF, 2017). Reformasi ini mengandung beberapa perbaikan untuk IMF. Pertama, meningkatkan dan menggandakan kuota anggota umum yang mengakibatkan peningkatan sumber daya keuangan IMF (IMF, 2016). Kedua, mengalihkan 6 persen dari kuota ke beberapa negara pasar berkembang dan negara berkembang. Ketiga, Brasil, Cina,

India, dan Rusia sebagai perwakilan negara pasar berkembang menjadi 10 anggota terbesar di IMF. Keempat, seluruh Dewan Eksekutif IMF akan dipilih dan mengakhiri sistem Direktur Eksekutif yang ditunjuk. Terdapat beberapa perbaikan yang dibawa oleh reformasi kuota. Setidaknya, reformasi ini dapat memperluas sumber daya pinjaman aman IMF yang akan membantu IMF untuk menyiapkan dana yang cukup bagi negara-negara yang mungkin ada. Masalah ketergantungan sementara IMF pada keinginan baik negara-negara untuk meminjamkan uang telah teratasi. Reformasi ini juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kritik terhadap sistem sebelumnya di mana dewan ditunjuk alih-alih dipilih.

Namun, tidak semuanya baik-baik saja. Terlebih lagi setelah reformasi pemungutan suara, negara-negara OECD masih mendominasi mayoritas pemungutan suara (Weisbrot & Johnston, 2016). Negara-negara BRIC meningkatkan hak suara mereka, namun negara-negara berkembang lainnya menurun sebesar tiga persen. Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan suara negara-negara berkembang tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan sepenuhnya. Meskipun IMF pada akhirnya dapat membuat AS menyetujui reformasi kuota dan dewan dalam Tinjauan IMF ke-14 yang dapat membantu mengatasi beberapa masalah, hal itu masih menyisakan masalah lama yang sama. AS masih memiliki kuota dan hak veto terbesar. Hal ini dapat dengan mudah memblokir keputusan dan proposal apa pun yang harus melewati ambang batas 85 persen suara karena AS masih memegang kuota di atas 15 persen. Membiarakan sistem ini tetap seperti ini tanpa menyelesaikan salah satu kelemahan utamanya akan membuat lembaga ini terjebak dalam sejarah. IMF akan selalu berada di bawah bayang-bayang sistem lama dan akan selalu bergantung pada negara-negara dengan kuota besar, terutama AS.

PENUTUP

Kesimpulan

Lembaga Bretton Woods telah dibentuk selama lebih dari 70 tahun. Globalisasi memberikan tantangan besar akan relevansi Lembaga Bretton Woods. IMF dan Bank Dunia dituntut untuk melakukan reformasi signifikan agar tetap relevan di abad ke-21. Mereka perlu memenuhi harapan masyarakat dan mengembangkan sistem yang lebih efektif untuk menjalankan fungsinya. Terdapat berbagai kritik yang ditujukan kepada lembaga-lembaga ini. Pertama, sistem kuota IMF dikritik karena menghambat dan menghambat evolusi lembaga ini karena suatu negara atau kelompok negara dapat memblokir keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem IMF. Kedua, kedua lembaga Bretton Woods didominasi oleh industri negara-negara, terutama AS. Ketiga, masih adanya kurangnya keterlibatan dan representasi negara-negara berkembang di dalam IMF dan Bank Dunia. Keempat, persyaratan pinjaman yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga ini menimbulkan kontroversi dan terkesan mempromosikan neoliberalisme. Beberapa ketentuan juga diragukan telah mencampuri kebijakan internal negara-negara peminjam. Kelima, munculnya lembaga keuangan Regional seperti NDB dan AIIB dapat mengancam keberadaan Lembaga Bretton Woods.

Terlepas dari tantangan dan kritik, baik Bank Dunia maupun IMF tetap berkontribusi dalam pemeliharaan perekonomian dunia. Lembaga-lembaga ini telah berupaya mereformasi dan meningkatkan sistem mereka. Kedua lembaga tersebut telah mempromosikan konsep kepemilikan dalam persyaratan pinjaman mereka. IMF juga telah menyesuaikan beberapa ketentuan persyaratan pinjamannya untuk memberikan lebih banyak perjanjian kepada negara-negara berkembang yang memiliki kebijakan nasional yang berbeda. Namun, hal itu belum berhasil mengatasi masalah tersebut. Kritik masih tetap ada dan Lembaga Bretton Woods masih berupaya untuk terus berkembang dan mereformasi persyaratan pinjamannya. Dewan Eksekutif IMF telah menyetujui peningkatan kuota umum dan reformasi dewan. Hal ini telah membawa beberapa perbaikan pada sistemnya. Tetapi masalah lama yang sama

belum teratasi. AS masih memegang saham suara terbesar dan mendominasi lembaga-lembaga tersebut.

Saran

Lembaga-lembaga reformasi Bretton Woods masih perlu melakukan upaya mendasar agar tetap relevan di abad ke-21. Reformasi mendasar di sini mencakup semua aspek yang dapat mengancam keberadaan lembaga-lembaga ini. Mereka masih perlu memaksimalkan implementasi kepemilikan dan meninjau kembali persyaratan bersyaratnya. Mereka juga masih perlu menyediakan lebih banyak ruang bagi negara-negara berkembang dengan meningkatkan suara, representasi, dan keterlibatan mereka. Reformasi yang ada telah berhasil sepenuhnya. Terakhir, lembaga-lembaga Bretton Woods ini, khususnya IMF, perlu melakukan reformasi dengan memikirkan kembali sistem kuotanya, terutama dominasi AS, yang menghambat perkembangan lembaga-lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Babb, S., & Kentikelenis, A. (2018). International Financial Institutions as Agents of Neoliberalism. In *The SAGE Handbook of Neoliberalism*.
- Eichengreen, B., & Woods, N. (2015). The IMF's Unmet Challenges. *Journal of Economic Perspectives*, 30(1).
- Faundez, J., & Tan, C. (2009). International Economic Law and Development Before and After Neo-Liberalism. *Warwick School of Law Legal Studies Research Paper*, 1.
- Griffith-Jones, S. (2015). Financing Global Development: the BRICS New Development Bank. *German Development Institute Briefing Paper*, 13.
- Guven, A. B. (2017). Defending Supremacy: IMF and the World Bank Navigate the Challenge of Rising Powers. *International Affairs*, 93(5).
- Ikechukwu, A. (2011). International Monetary Fund's Quota System and Voting Rights: A need for Review. *Global Journal of Finance and Economic Management*, 1(2).
- IMF. (2016). *IMF Press Release 16/25: historic Quota and Governance*

Reforms Become Effective.

- IMF. (2017). *Acceptances of the Proposed Amendment of the Articles of Agreement on Reform of the Executive Board and Consent to 2010 Quota Increase*.
<https://www.imf.org/external/np/sec/misc/consents.htm#a1>
- IMF. (2018). *International Monetary Fund, IMF Conditionality Factsheet*.
- IMF. (2025). *International Monetary Fund, IMF Quotas Factsheet*.
<https://www.imf.org/en/about/factsheets/sheets/2022/imf-quotas>
- Lowenfeld, A. F. (2008). *International Economic Law* (2nd Edition). Oxford University Press.
- Mazower, M. (2012). *Governing the World: the History of an Idea*. Allen Lane History.
- Momani, B. (2004). The American Politicization of the International Monetary Fund. *Review of International Political Economy*, 11(5).
- Parkinson, M. (2014). *Are the Bretton Woods Institutions Still Relevant for the Emerging Market Economies? Reinventing Bretton Woods Conference*.
- Qureshi, A. H., & Ziegler, A. R. (2007). *International Economic Law* (2nd ed.). Sweet and Maxwell.
- Rodrik, D. (2006). Goodbye Washington Consensus, hello Washinton Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in 1990s: Learning from a Decade of Reform. *Journal of Economic Literature*, 44(4).
- SEED Europe. (2008). *World Bank and Conditionalities: Poor Deal for Poor Countries*.
- Stiglitz, J. (2008). Is There a Post-Washington Consensus Consensus? In *The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance*. Oxford University Press.
- Truman, E. M. (2015). What Next for the IMF (2015). *Peterson Institute for International Economics Policy Brief*.
- Wade, R. H., & Vestergaard, J. (2015). Why the IMF at an Impasse, and What Be Done about it? *Global Policy*, 6.
- Weisbrot, M., & Johnston, J. (2016). Voting Share Reform at the IMF: Will

-
- it make a difference? *Centre for Economic and Policy Research.*
- Weiss, M. A. (2017). *Congressional Research Service Report: Asian Infrastructure Investment Bank.*
- Woods, N. (2002). The Fund and The Bank: Towards Better International Economic Institutions. *New Economy*, 9(2).
- World Bank. (2006). *Good Practice Principles for the Application of Conditionality: A Progress Report.*
- World Bank. (2007). *Conditionality in Development Policy Lending: Final Report.*
- World Bank. (2015). *World Bank, Transformation through infrastructure: World Bank Group infrastructure strategy update FY2012–2015.*